

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.V. Dicey, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971).
- Abdul Manan, Dalam Makalah, *Eksekusi dan lelang dalam hukum acara perdata*, Jakarta, 2011.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoristis Dan Praksis*, (ar-Ruzz Media: Jogjakarta), 2011.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia), 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006).
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, (Bangkok: International Commission of Jurist, 1965).
- Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960).

Website

Wahyu Kuncoro, BOT (Built, Operate and Transfer) Agreement, (www.shoutmix.advokadku.com, 2006).

<http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html>,

<http://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

_____, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

_____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.